

**DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KAWASAN RESORT PENGELOLAAN HUTAN MANGUNAN
KABUPATEN BANTUL**

Syarif Nurizwan¹, Utami Dewi²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹*syarif.nurizwan@student.uny.ac.id*

²*utami.dewi@uny.ac.id*

Abstract

Mangunan Forest Management Resort as a tourism area needs dynamic capability of stakeholders to adjust various future needs, sustainability and improvement of problems. This study aimed to analyze the dynamic capabilities aspects of Dynamic Governance in the development of tourism in RPH Mangunan and its inhibited factors. The research design used descriptive with qualitative approach. The results of this study showed that RPH Mangunan had paid attention to the three aspects dynamic capability of Dynamic Governance, that was Think Ahead, Think Again and Think Across. The inhibited factors of Dynamic Governance were: 1) Low quality of human resources 2) Lack of coordination between stakeholders, especially related to the development of tourism infrastructure 3) limited budget.

Keywords: *Dynamic Governance, Tourism Development, and RPH Mangunan*

Abstrak

Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan sebagai kawasan pariwisata perlu kemampuan dinamis stakeholders agar menyesuaikan berbagai kebutuhan di masa depan, keberlanjutan dan perbaikan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kemampuan dinamis dari *Dynamic Governance* dalam pengembangan pariwisata di RPH Mangunan beserta faktor penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPH Mangunan telah memperhatikan ketiga aspek kemampuan dinamis dari *Dynamic Governance* yaitu Think Ahead, Think again dan Think across. Faktor penghambat antara lain: 1) Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah 2) Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terutama terkait pengembangan prasarana pariwisata 3) Terbatasnya anggaran.

Kata kunci : *Dynamic Governance, Pengembangan pariwisata, dan RPH Mangunan*

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi wisata yang tinggi. Potensi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu potensi alam dan budaya masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kelompok kegiatan wisata seperti wisata alam, wisata pesisir, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual, dan wisata kuliner. Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata bisa menjadi sektor pemasukan Negara yang mampu mendukung perekonomian masyarakat dan biaya-biaya pembangunan.

Salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengembangan sektor pariwisata yang pesat dan menjadi perhatian adalah Kabupaten Bantul. Banyak destinasi wisata baru yang dibuka di Kabupaten Bantul. Hal tersebut didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendorong kelompok sadar wisata untuk kreatif dalam mempromosikan potensi wisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Bantul sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan. Berikut data kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata,

Tabel 1. Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah (Rp)
2012	12,529,648,331
2013	14,533,814,042
2014	16,046,012,057
2015	18,281,328,042
2016	21,901,264,614

Sumber: Data diolah dari Buku Statistik Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2016

Dari Table 1, PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. PAD di sektor pariwisata pada tahun 2012 sebesar Rp. 12,529 milyar dengan proporsi PAD 8,18%. Kemudian tahun 2016 mengalami kenaikan pesat yaitu 19,8% menjadi Rp. 21,901 milyar dengan proporsi PAD 6,2%. Kawasan wisata di Kabupaten Bantul yang sering dikunjungi wisatawan adalah wisata di daerah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan yang merupakan Kawasan Hutan Lindung. RPH Mangunan mempunyai potensi besar sebagai sektor pariwisata yang menunjang perekonomian masyarakat. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 84 tahun 2016 tentang Jasa Layanan Wisata di Kawasan RPH Mangunan, RPH Mangunan sekarang ini dibagi menjadi 7 blok yang

dikelompokkan berdasarkan kondisi tegakan yang ada, yaitu Blok terong, Sudimoro I, Sudimoro II, Sudimoro III, Gumelem, Kediwung dan Ceme. Terdapat 7 objek wisata yang di kelola RPH Mangunan yaitu Puncak Becici, Bukit Panguk Kediwung, Bukit Mojo Gumelem, Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Songgo Langit, dan Pinus Pengger.

Pengembangan sejumlah objek wisata di RPH Mangunan, tidak lepas dari hambatan dan permasalahan yang ada. Kemampuan dinamis dari pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kawasan RPH Mangunan menjadi hal penting. Kemampuan dinamis diperlukan sebagai tujuan bersama ke depan, arah, strategi kebijakan, dan berpikir kreatif dalam melakukan inovasi. Pihak yang terlibat baik Pemerintah maupun masyarakat pengelola pariwisata dituntut untuk selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan trend masyarakat saat ini, agar pariwisata dapat kompetitif dan berkelanjutan lingkungan. Namun, dukungan informasi yang dimiliki masyarakat pengelola pariwisata di kawasan hutan lindung masih kurang, sehingga kemampuan dinamis pengelola pariwisata dalam pengembangan yang dilakukan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman peran sebagai pelaku wisata di kawasan hutan lindung yang

membutuhkan pelayanan pariwisata yang baik dan kesadaran akan lingkungan. Selain itu berbagai permasalahan yang dihadapi di RPH Mangunan seperti kurangnya koordinasi pengelola pariwisata dengan pemerintah setempat, rentan terjadi perbedaan persepsi antara sektor kehutanan dan non kehutanan, sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai serta keberlanjutan lingkungan di kawasan hutan lindung mangunan.

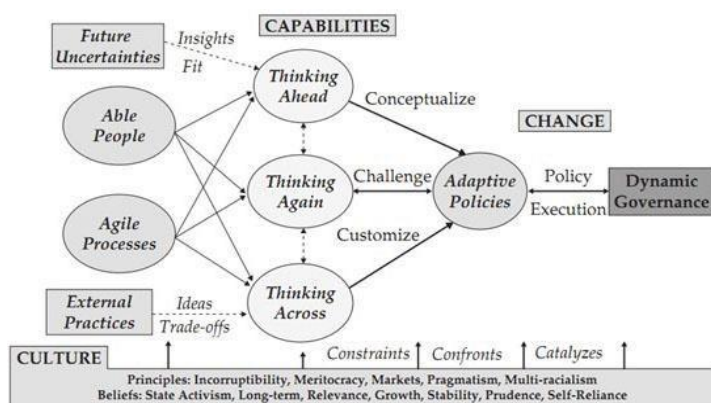
Keberhasilan pengembangan pariwisata dengan menyesuaikan berbagai kebutuhan masyarakat di masa depan dan perbaikan akan permasalahan serta hambatan yang timbul saat ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dinamis dari pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata RPH Mangunan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengembangan pariwisata di RPH Mangunan dengan konsep tata kelola dinamis yaitu *Dynamic Governance*.

Konsep dari *Dynamic Governance* sebagai kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program terhadap masyarakat, sehingga kepentingan jangka panjang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan (Porter,2007:8). Terdapat dua aspek *Dynamic Governance* menurut Boon dan Geraldine dalam Wirman Syafri (2012:182-183) adalah:

1. Budaya organisasi pemerintah meliputi;
 - a. *integrity* (Integritas)
 - b. *incorruptibility* (tidak korupsi)
 - c. *meritocracy* (berdasar kemampuan)
 - d. *market* (orientasi pasar)
 - e. *pragmatism* (pragmatis)
 - f. *multi-racialism* (multi etnik)
 - g. *long term* (jangka panjang)
 - h. *relevance* (relevan)
 - i. *growth* (pertumbuhan)
 - j. *stability* (stabilitas)
 - k. *prudence* (bijaksana)
 - l. *self-reliance* (mandiri)
2. Kemampuan yang dinamis meliputi:
 - a. *thinking ahead* (berpikir ke depan),
 - b. *thinking again* (mengkaji ulang), dan
 - c. *thinking across* (belajar dari pengalaman negara / organisasi lain).

Kazim dalam jurnal Muchlas dan Zulfan (2017:5) menyatakan bahwa komponen kapabilitas mencerminkan bagaimana pola pikir atas dasar tiga hal yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. *Thinking ahead* menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi dimasa mendatang yang mungkin dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. Sebaliknya, *thinking again* akan merefleksikan kemampuan dan keterbukaan untuk melihat pada kebijakan sebelumnya, kemudian dievaluasi dan disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Sementara, *thinking across* merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman ide dan konsep aktor-aktor lain.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Dynamic Governance* dari Boon dan Geraldine. Dalam penelitian ini berfokus pada aspek kemampuan dinamis yang terdiri tiga unsur utama, yaitu *Think Ahead*, *Think Again*, dan *Think Across*. *Dynamic Governance* memerlukan penanaman kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi dan berpikir lintas batas atau menyeluruh ke dalam strategi dan kebijakan lembaga sektor publik sehingga ada pembelajaran, pelaksanaan, inovasi dan perubahan yang terus-menerus di RPH Mangunan. Hal ini sesuai dengan kondisi



Gambar 1. Kerangka *Dynamic Governance*

Sumber: Diolah dari Boon dan Geraldine dalam jurnal Aminullah (2015:20)

RPH Mangunan yang merupakan sektor pariwisata agar pengembangan pariwisata di RPH Mangunan beradaptasi secara dinamis agar dapat berkembang secara kompetitif, berinovasi sesuai minat masyarakat dan berkelanjutan dari keseimbangan aspek fungsi hutan yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchlas M. Tahir dan Zulfan Nahrudin (2017) dengan judul *Kapabilitas Dynamic Governance dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya antisipasi RTH melalui kebijakan, pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dipahami secara menyeluruh namun opsi strategi yaitu pemanfaatan ruang-ruang dan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH. Relevansi dengan penelitian ini adalah persamaan dalam teori yang digunakan yaitu *Dynamic Governance* yang terdiri dari tiga indikator yaitu think ahead, think again dan think across sebagai aspek kemampuan dinamis.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada stakeholders yang terlibat untuk lebih meningkatkan perannya dalam

pengembangan pariwisata di RPH Mangunan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di RPH Mangunan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Kesatuan Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Kelurahan Desa Mangunan dan Koperasi Notowono. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. Sedangkan subjek penelitian ini terdiri dari Staf Analisis dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, staf Perencanaan dan Perlindungan Hutan KPH DIY, Mantri RPH Mangunan, Sekretaris Desa Mangunan, Ketua Koperasi Notowono, Sekretaris Koperasi Notowono, Ketua Pinussari Mangunan, Ketua Seribu Batu Mangunan, Parjio, dan pemilik usaha warung di RPH Mangunan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 84 tahun 2016 ini mengatur tentang kerjasama pemanfaatan hutan

lindung. Pemanfaatan hutan lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Upaya pengembangan pariwisata di RPH Mangunan tengah gencar dilakukan dan perlu beradaptasi secara dinamis agar dapat berkembang, berinovasi dan berkelanjutan sehingga penelitian ini menggunakan konsep kemampuan dinamis dari *Dynamic Governance*.

Dynamic Governance dalam Pengembangan Pariwisata di RPH Mangunan

Kemampuan dinamis *Dynamic Governance* dari Boon dan Geraldine dalam Wirman Syafri (2012:183) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, *Think Ahead* (berpikir ke depan), *Think Again* (berpikir kembali), dan *Think Across* (berpikir lintas batas) sebagai berikut:

1. *Think Ahead* (Berpikir ke Depan)

Kazim dalam penelitian relevan Muchlas dan Zulfan (2017:5) *thinking ahead* menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi dimasa mendatang

yang mungkin dapat berdampak pada kondisi di dalam suatu institusi.

Wirman Syafri (2012:183) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir ke depan dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang terjadi di masa yang akan datang dengan kebijakan adaptif yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat.

Pengembangan pariwisata di kawasan RPH Mangunan sudah berposes ke depan atau *thinking ahead*. Hal ini terlihat dari adanya dokumen rencan induk yang tertuang dalam *Grand Desain Wana Wisata Budaya Mataram, RPHJP 2018- 2023*, visi misi serta tujuan. *Grand Desain Wana Wisata Budaya Mataram* adalah dokumen perencanaan induk dalam mengembangkan obyek-obyek wisata alam menjadi sebuah desain wanawisata yang berbasis budaya Mataram tanpa merubah keasliannya. Selain itu adanya pertemuan antarpengelola di RPH Mangunan sebagai bentuk proyeksi jangka pendek yang merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan usulan saran, gagasan, pendapat, pengambilan keputusan yang efektif serta agenda kegiatan atau program ke depan secara bersama-sama.

Adanya proyeksi ke depan dalam pengembangan pariwisata di kawasan RPH

Mangunan agar dapat terencana, terarah, serta mengantisipasi kemungkinan ancaman di masa depan, dalam arti tercipta keberlanjutan lingkungan tanpa rusaknya lingkungan hutan lindung. Namun pengembangan masih sebatas wana wisata sedangkan konsep kebudayaan mataram masih belum optimal. Berikut identifikasi persebaran potensi budaya di RPH Mangunan. Pengembangan konsep kebudayaan mataram masih dalam tahap potensi identifikasi potensi budaya dan pelaksanaan masih bersifat event.



Gambar 2. Peta Identifikasi Budaya RPH Mangunan

Sumber: Sumber: Data Diolah dari Arsip Grand Desain Wana Wisata Budaya Mataram

2. *Think Again* (Berpikir kembali)

Think Again memiliki arti berpikir kembali, merupakan kemampuan meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program (Syafri, 2012:184) . Proses *thinking again* yaitu meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan umpan balik dari aktor yang terlibat (Aminullah, 2015:28)

Kebijakan atas pemanfaatan hutan lindung sebagai jasa lingkungan merupakan amanat perundangan dan masyarakat sekitar RPH Mangunan merasakan hasil positif sesuai tiga fungsi hutan yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Proses berpikir kembali yaitu dilakukan pertemuan rutin setiap bulan sebagai bentuk evaluasi antarpihak yang berkepentingan sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang berjalan. Hal ini menunjukkan terdapat proses berpikir kembali yang dilakukan di RPH Mangunan sebagai bentuk perbaikan atas permasalahan dan hambatan yang terjadi serta peningkatan pengembangan pariwisata.

Berbagai permasalahan yang sedang dilakukan dan dalam tahap pengerjaan adalah masalah aksesibilitas dan SDM. Namun permasalahan lain yang perlu perhatian lebih dengan pihak pemerintah yaitu ketersediaan air bersih, ketersediaan pemancar sinyal, dan pelaksanaan pembangunan dari rencana induk pengembangan serta pengawasan MOU kerjasama antara Dishutbun DIY dan Koperasi Notowono yang sudah dirancang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati. Hal ini terlihat sarana prasarana masih menggunakan cor semen dan lahan dibersihkan sekali untuk pembukaan lahan pariwisata. Berikut proses

Tabel 2. Proses Berpikir Kembali RPH Mangunan

No	<i>Thinking again</i>	Tujuan
1	MOU kerjasama Dishutbun DIY dan Koperasi Notowono dengan 10% dari hutan lindung digunakan sebagai blok pemanfaatan jasa lingkungan dan bagi hasil 75% pengelola dan 25% PAD	Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap hutan lindung untuk menjaga Kelestarian lingkungan dan percepatan pengembangan
2	Pembuatan parkir diluar maupun di dalam kawasan hutan dengan menyewa lahan milik warga untuk	Penambahan parkir untuk mengatasi keterbatasan parker
3	Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi baik dari Dinas terkait, LSM seperti Kapilawastu, PHRI, dan lain-lain.	Meningkatkan SDM pengelola pariwisata baik dari aspek pariwisata maupun kelestarian hutan
4	Perbaikan jalan dengan aspal diluar kawasan hutan, sedangkan perbaikan dan perluasan di dalam kawasan hutan dengan semen ataupun tanah untuk perluasan sisi pinggir jalan dan jalan berlubang	Meningkatkan aksesibilitas terhadap permasalahan jalan yang belum memadai
5	Pengajuan program sumur dalam dan mencari mata air. Sejauh ini mengandalkan truk tangki air dan memperbanyak tampungan air	Meningkatkan ketersediaan air bersih untuk mengatasi keterbatasan air
6	Penerangan berupa LPJU, baru terealisasi sebagian dengan dua tahap. Pihak pengelola merkomendasikan <i>solar cell</i> namun terkendala keterbasan biaya	Meningkatkan penerangan jalan untuk malam hari dan pengoptimalan wisata malam di RPH Mangunan

thinking again di RPH Mangunan Proses thinking again tersebut sebagai proses berpikir kembali dalam pengembangan pariwisata di kawasan RPH antar stakeolders dengan melihat kegiatan yang berjalan, kemudian dievaluasi dan disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dari kegiatan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

3. *Think Across* (Berpikir lintas batas)

Kazim dalam penelitian relevan yang dilakukan Muchlas dan Zulfan (2017:5) menyatakan thinking Across menunjukkan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman ide dan konsep dari aktor-aktor lain. Think

Across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pemikiran orang lain, pendapat, dan ide-ide lain dari luar yang bisa diterapkan dalam pengembangan pariwisata di kawasan RPH Mangunan. Proses thinking across dapat menciptakan ide-ide baru dari kombinasi ide-ide dengan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu yang muncul (Syafri 2012:186).

Proses thinking across yang dilakukan terlihat dari adanya berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di RPH Mangunan. Aktor utama pengembangan pariwisata di kawasan RPH Mangunan yaitu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY beserta jajaran

dibawahnya yaitu KPH DIY dan RPH Mangunan bersama Koperasi Notowono sebagai badan hukum pengelola pariwisata di kawasan RPH Mangunan. Kemudian dalam pelaksanaannya banyak aktor lain yang terlibat yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Para pihak yang berkepentingan saling bertukar ide, gagasan dan pendapat terkait program, strategi, inovasi, serta pemecahan masalah dan solusi. Hal ini berdampak pada kreatifitas pengelola yang terus berinovasi sehingga dapat menyesuaikan trend dan menjadi salah satu model pemanfaatan hutan dari daerah lain. Selain itu adanya sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman orang lain. Hal ini menunjukkan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman ide dan konsep dari aktor-aktor lain.

Proses *thinking across* salah satunya dapat belajar suatu praktik yang memiliki kemiripan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Porter, 2007:15). Adanya adopsi beberapa pelayanan dan fasilitas wanawisata baik di luar maupun di dalam negeri yang tercantum dalam rencana induk pengembangan yaitu Grand Desain Wana

Wisata Budaya Mataram merupakan bentuk berpiki lintas batas di RPH Mangunan. Beberapa pelayanan dan fasilitas wanawisata baik di luar maupun di dalam negeri yang direncanakan diadopsi untuk RPH Mangunan yaitu, Canopy Trail di Thenmala Ecotourism, Kollam, Kerala, India, yang digunakan untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas agar tetap bias menikmati keindahan alam, Observation View Taman Nasional Seneca, Camping Ground di Curug Cilember, Bogor, Kegiatan Kesenian di Malam Hari yaitu pertunjukkan Musical Dancing Fountain Thenmala Ecotourism, India, papan informasi, playground dan lain-lain. Namun fasilitas wisata di kawasan RPH Mangunan masih baru tahap pengembangan untuk menjadi wisata inklusif. Salah satu yang sedang digiatkan di kawasan RPH Mangunan adalah pariwisata inklusif hal ini dapat dengan mengadopsi Canopy Trail di Thenmala Ecotourism, Kollam, Kerala, India dalam rencana induk. Canopy Trail tersebut digunakan untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas agar tetap bisa menikmati keindahan alam. Prasarana tersebut sebagai salah satu prasarana pariwisata inklusif yang ramah disabilitas.

Faktor Penghambat

Pengembangan pariwisata pada suatu destinasi wisata diharapkan agar dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang sudah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya pembangunan pariwisata masih menemui hambatan atau kendala yang dihadapi RPH Mangunan. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi di RPH Mangunan.

Pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan dari petani yang menggarap hutan produksi menjadi pelaku wisata. Sementara dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan cara dan pola pikir yang berbeda terutama kegiatan pariwisata di kawasan hutan lindung yang membutuhkan pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan wisata. Pengelola wisata perlu pemahaman untuk menelaraskan keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

Kedua, Kurangnya koordinasi antarpihak pengelola yaitu Koperasi Notowono dan pihak Pemerintah terutama terkait pengembangan fisik yaitu prasarana pariwisata. Pengembangan lebih banyak dilakukan dengan swadaya masyarakat. Hal ini berakibat pengembangan pariwisata akan berjalan lamban dan masih banyak

terjadi kekurangan. Sehingga dibutuhkan koordinasi antara pihak pengelola Koperasi Notowono dengan Pemerintah untuk membantu dalam pengembangan pariwisata agar lebih optimal.

Ketiga, terbatasnya anggaran yang berdampak padasarana dan prasarana pendukung pariwisata belum memadai. Pengembangan banyak dilakukan dengan swadaya masyarakat yang berasal dari hasil kegiatan pariwisata. Sedangkan pengembangan pariwisata sebagai industri membutuhkan biaya yang besar untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata. Fasilitas wisata belum memadai seperti kurangnya ketersediaan air bersih, lahan parkir yang terbatas, penerangan jalan yang kurang, jalan yang sempit, kurangnya besi pembatas jalan maupun penahan tanah, penguat sinyal, dan lain- lain.

SIMPULAN

RPH Mangunan telah memperhatikan tiga aspek kemampuan dinamis dari dynamic governance. RPH mangunan menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi dimasa mendatang dan anstipasi yang mungkin dapat berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kegiatan pariwisata. Hal ini terlihat adanya kerjasama Koperasi Notowono dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

DIY beserta jajarannya sebagai proses penentuan berpikir jauh ke depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*) dan berpikir lintas batas (*thinking across*). Berdasarkan analisis *Dynamic Governance* dari aspek kemampuan dinamis, peneliti menyimpulkan bahwa :

Perlu ditingkatkan pemahaman dan konsep arah pengembangan agar selaras dan merata antar stakeholder. Selain itu, pengembangan masih sebatas wana wisata untuk konsep kebudayaan mataram belum optimal.

Berbagai peninjauan kembali permasalahan yang sedang dilakukan adalah masalah aksesibilitas dan SDM yang harus terus ditingkatkan. Namun permasalahan yang perlu membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah yaitu ketersediaan air bersih, ketersediaan pemancar sinyal serta pengawasan karena masih terdapat pelanggaran penggunaan *cor* semen dalam sarana prasarana, hal ini melanggar kesepakatan bersama.

Proses berpikir lintas batas dinilai sudah baik. Terlihat adanya berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata RPH Mangunan. Hal ini terwujud dalam sosialisasi, pelatihan maupun pembinaan sebagai bentuk pertukaran pendapat, dan ide-ide antar aktor, sehingga ada pembelajaran, inovasi,

kreatifitas dan perubahan yang terus-menerus. Kemudian adanya adopsi beberapa pelayanan dan fasilitas wanawisata baik di luar maupun di dalam negeri yang tercantum dalam rencana induk pengembangan yaitu Grand Desain Wana Wisata Budaya Mataram.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi antara lain : 1) Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah, 2) Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terutama terkait pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, 3) Terbatasnya anggaran.

KPH DIY seyogyanya meningkatkan sosialisasi pemahaman konsep pembangunan Grand Desain Wana Wisata Budaya Mataram dan RPHJP 2018-2023 secara merata serta mendukung pengoptimalan konsep budaya Mataram. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM pengelola dengan mempertahankan dan memulihkan kondisi alam lingkungan secara serasi. Pengelola pariwisata RPH Mangunan seyogyanya meningkatkan kemampuan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata seyogyanya berupa bangunan semi permanen dan alami atau sesuai dengan MOU kerjasama dan meningkatkan

pengembangan fasilitas pendukung secara inklusif

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah. (2015). *Dynamic Governance (Kerangka Konseptual: Melembagakan Budaya, Kapabilitas, dan Perubahan)*. Jurnal Kebangsaan Volume 9 Nomor 1 Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan

Dinas Pariwisata DIY. (2017). *Visting jogja RPH Mangunan*. Dikases pada visitingjogja.jogjaprovo.go.id tanggal 24 september 2017

Gubernur DIY. Peraturan Gubernur, Nomor 84 tahun 2016 tentang tarif jasa layanan wisata di kawasan hutan pinus mangunan.

KPH Yogya. (2017). *Pembelajaran KPH*. Diakses pada http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=196 tanggal 10 september 2017

Moleong, Lexy J. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Porter, Michael E. (2007). *Dynamic Governance (Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore)*. Singapura : Jurnal World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

Republik Indonesia. Undang undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Syafri, Wirman. (2011). *Dynamic*

Governance dan Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. <http://wirman-syafri.ipdn.ac.id/dynamic-governance-dan-perspektif-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/> tanggal 20 september 2017

Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang administrasi publik*. Jakarta: Erlangga

Tahir, Muchlas M. & Nahrudin, Zulfan. (2017). *Kapabilitas Dynamic Governance dalam Optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau Di kota makassar*. Jurnal: Universitas Muhammadiyah Makassar

Yoeti, Oka. A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta:PT Karya Unipress